

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
DALAM RANGKA PENERAPAN SEBAGAI SATKER BADAN LAYANAN UMUM
RS. BHAYANGKARA KEDIRI DI ERA BPJS**

DIAN MARTASARI, ABU TALKAH, ARISYAHIDIN

Universitas Islam Kediri, Kediri

email : martasari.dian@yahoo.com

ABSTRAK

Peluang menjadi satker BLU terbuka bagi satker Pemerintah yang melaksanakan tugas dalam bidang operasional pelayanan public. Satker BLU memiliki fleksibilitas tinggi yang merupakan jawaban atas penerapan kinerja instansi pemerintah yang selama ini masih dinilai berkinerja buruk. Dalam pola pengelolaan Badan Layanan Umum kinerja terukur dalam dinilai melalui kegiatan penilaian kinerja BLU, untuk menilai capaian penyediaan layanan umum yang diselenggarakan BLU.

Penelitian ini menggunakan alat rasio keuangan untuk mencari nilai kinerja keuangan RS. Bhayangkara Kediri. Alat rasio yang digunakan berupa Rasio Kas, Rasio Lancar, Periode Penagihan Piutang, Perputaran Aset Tetap, Imbalan atas Aktiva Tetap, Imbalan Ekuitas dan Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional. Interpretasi Data atas rasio ini dilakukan pada masa sebelum BPJS tahun 2011-2013 dan setelah diberlakukannya BPJS pada tahun 2014-2016. Sedangkan satker BLU mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan per triwulan, sehingga per tahun akan terkumpul data hasil rasio keuangan sebanyak 4 point, yang selanjutnya akan dibandingkan.

Hasil penelitian menunjukkan, dari 7 alat rasio yang dianalisa, 5 diantaranya menunjukkan peningkatan signifikan setelah berlakunya BPJS di RS. Bhayangkara Kediri. Hal ini ditegaskan lagi dengan tampilan grafik per analisa rasio. Sedangkan 2 rasio menurun terjadi pada Imbalan atas Aktiva Tetap dan Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional tidak berhubungan langsung dengan pelayanan BPJS karena terkait dengan pendapatan APBN dan efisiensi aset tetap RS. Bhayangkara Kediri.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan BLU, BPJS Kesehatan, Kepuasan Pasien ABSTRACT

ABSTRACT

Quality of service is the overall characteristics of the service which is demonstrated in satisfying of consumers's needs , and BPJS Health Care is a statutory body that set up to organize the health insurance program, as well as patient satisfaction is a feeling of the patient's level arising as a result of the performance of health service obtained after comparing with what patient's expected. According to DJSN after doing the monitoring and evaluation of BPJS Health Care program, many participants complained with tiered referral service system that applied by BPJS Health Care, especially in Class II Inpatient Sekayu Regional General Hospital. The purpose of this study was to determine the relationship of BPJS Health Care service quality with patient's satisfaction in Class II Inpatient Sekayu Regional General Hospital.

This study using Analytical research design. The independent variable is the BPJS Health Care service quality and the dependent variable is patient's satisfaction. Samples taken using Proportional Stratified Random Sampling technique that found 146 patients in Class II Inpatient Sekayu Regional General Hospital. The research instrument used questionnaire. The data were analyzed using Chi Square statistical tests with significance level of p Value $\leq 0,05$.

The results showed as many as 65 respondents (44,5%) stated the BPJS Health Care service quality is not good, and patient's satisfaction as many as 69 respondents (47,3%) said not satisfied with the BPJS Health Care service. Results of statistical test Chi Square stating there is a relationship between BPJS Health Care service quality with level of patient satisfaction in Class II Inpatient Sekayu Regional General Hospital (p Value = 0,000).

Keywords : Quality of Service, BPJS Health Care, Patient's Satisfaction

PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan dengan jelas bahwa satker dengan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada instansi pemerintah yang telah berstatus BLU untuk secara langsung dapat menggunakan penerimaannya bagi kegiatan operasional dan investasi tanpa harus disetor terlebih dahulu ke kas negara, demikian juga dengan surplus yang diperolehnya

Dalam pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum kinerja terukur dan dinilai melalui kegiatan penilaian kinerja BLU. (pasal 1, per DJPB 2014). Kegiatan penilaian kinerja BLU ini adalah suatu cara dalam menilai capaian penyediaan layanan umum yang diselenggarakan oleh BLU, yang meliputi penilaian aspek keuangan dan penilaian aspek pelayanan yang dilakukan secara tahunan. Khusus penilaian aspek keuangan merupakan penilaian kinerja BLU berdasarkan analisis data laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU.

Kinerja keuangan pada penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum di RS. Bhayangkara Kediri sejak tahun 2010 menjadikan RS. Bhayangkara Kediri sebagai salah satu satker BLU bidang kesehatan yang mengalami era sebelum dilaksanakannya jaminan kesehatan masyarakat (BPJS) yang diterapkan pada awal 2014 hingga saat ini.

Mengingat pentingnya analisa kinerja keuangan untuk mengetahui kualitas pelayanan satker BLU kepada masyarakat, khususnya untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan satker BLU maka perlu diadakan penelitian terhadap analisis kinerja keuangan RS. Bhayangkara Kediri di era BPJS, sehingga penelitian ini mengambil judul “Analisa Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Dalam Rangka Penerapan Sebagai Satker Badan Layanan Umum RS. Bhayangkara Kediri di Era BPJS”.

1. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan RS. Bhayangkara Kediri yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum di era BPJS saat ini dibandingkan sebelumnya.
- b. Untuk mengetahui apakah penerapan BPJS sangat mempengaruhi kinerja keuangan satker BLU RS. Bhayangkara Kediri.

2. METODE PENELITIAN

Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan Analisis Tren atas rasio-rasio keuangan yang dilakukan pada tiap laporan keuangan triwulan BLU RS. Bhayangkara Kediri.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Hasil Penelitian

Penilaian kinerja keuangan dari sisi aspek keuangan dilakukan dengan menggunakan rumus atas beberapa indikator penilaian yang telah ditentukan, meliputi aspek Rasio Keuangan dan Rasio Pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional. (Per-36/PB/2012, Lamp.1)

Rasio keuangan yang digunakan satker BLU bidang layanan kesehatan berupa :

Rasio Keuangan

N o	Indikator	Rumus/ Aspek Penilaian
1	Rasio Kas (<i>Cash Ratio</i>)	$\frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$
2	Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$
3	Periode Penagihan Piutang (<i>Collection</i>)	$\frac{\text{Piutang Usaha} \times 360}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 1 \text{ hari}$

Period)			
4	Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)	Pendapatan Operasional	$\frac{x}{100}$
		Aset Tetap	%
5	Imbalan atas Aktiva Tetap (return on asset)	Surplus atau Defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian	$\frac{x}{100}$
		Aset Tetap	%
6	Imbalan Ekuitas (Return on equity)	Surplus atau Defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian	$\frac{x}{100}$
		Ekuitas	%
7	Pendapatan PNBPN terhd By Ops	Pendapatan PNBPN	$\frac{x}{100}$
		Biaya Operasional	%

Sumber: Per-36/PB/2012, Lamp 1

a.1 Rasio Kas (Cash Ratio)

Dipergunakan untuk melihat perbandingan antara kas dan setara kas dengan kewajiban jangka pendek.

Rumus :

$$\frac{\text{kas dan setara kas}}{\text{kewajiban jangka pendek}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- Kas adalah uang tunai atau saldo bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU.
- Setara kas (*cash equivalen*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat liquid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan.
- Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/ diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

a.2. Rasio Lancar (Current Ratio)

Digunakan untuk melihat perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Rumus :

$$\frac{\text{Aset lancar}}{\text{kewajiban jangka pendek}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut :
 - Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca;
 - Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
 - Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.
- Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka dan biaya dibayar dimuka.
- Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/ diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

a.3 Periode Penagihan Piutang (Collecting Periode)

Digunakan untuk melihat perbandingan antara piutang usaha dengan pendapatan usaha dalam satu tahun.

Rumus :

$$\frac{\text{Piutang usaha} \times 360}{\text{pendapatan usaha}} \times 1 \text{ hari}$$

Penjelasan :

- Piutang usaha adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLU.
- Pendapatan usaha merupakan PNBPN BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/ jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

a.4. Perputaran Aset Tetap (*Fixed Aset Turn Over*)

Digunakan untuk melihat perbandingan antara pendapatan operasional dengan aset tetap.

Rumus :

$$\frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- a. Pendapatan operasional merupakan PNBPN BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/ jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN dan hibah.
- b. Aset Tetap adalah nilai perolehan aset tetap dikurangi konstruksi dalam pengerjaan.

a.5. Imbalan atas Aset Tetap (*Return on Fixed Aset*)

Melihat perbandingan antara Surplus/ defisit sebelum pos keuntungan/ kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan, dengan nilai perolehan aset tetap tidak termasuk konstruksi dalam pengerjaan.

Rumus :

$$\frac{\text{Surplus atau defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- a. Surplus/ defisit sebelum pos keuntungan/ kerugian adalah surplus/ defisit sebelum pos keuntungan/ kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, dan biaya penyusutan.
- b. Aset Tetap adalah nilai perolehan aset tetap dikurangi konstruksi dalam pengerjaan.

a.6. Imbalan Ekuitas (*Return on Equity*)

Digunakan untuk melihat perbandingan antara surplus/ defisit sebelum pos keuntungan/ kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan, dengan ekuitas setelah dikurangi surplus/ defisit tahun berjalan.

Rumus :

$$\frac{\text{Surplus atau defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- a. Surplus/ defisit sebelum pos keuntungan/ kerugian adalah surplus/ defisit sebelum pos keuntungan/ kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, dan biaya penyusutan.
- b. Ekuitas adalah selisih antara hak residual BLU atas aset dengan seluruh kewajiban yang dimiliki, dikurangi surplus/ defisit tahun berjalan.

a.7. Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional

Rumus :

$$\frac{\text{Pendapatan BLU}}{\text{Biaya Operasional}} \times 100\%$$

Penjelasan :

- a. Pendapatan BLU merupakan PNBPN BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/ jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN.
Biaya Operasional merupakan seluruh biaya langsung yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat meliputi biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa dan biaya langsung lainnya yang berkaitan

langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh satker BLU, baik yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni APBN

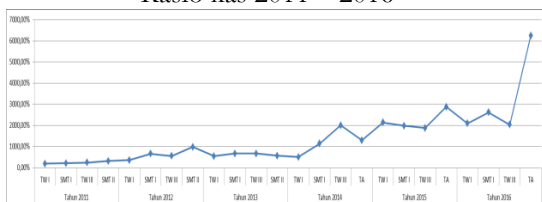
maupun pendapatan operasional satker BLU. Ringkasan data laporan keuangan dapat disajikan sebagai berikut :

No	Rasio Keuangan	Tahun 2011				Tahun 2012				Tahun 2013				Tahun 2014				Tahun 2015				Tahun 2016				
		TW I	SMT I	TW III	SMT II	TW I	SMT I	TW III	SMT II	TW I	SMT I	TW III	SMT II	TW I	SMT I	TW III	TA	TW I	SMT I	TW III	TA	TW I	SMT I	TW III	TA	
1	Rasio Kas (cash ratio)	180,84%	203,52%	240,77%	310,15%	348,09%	655,30%	549,08%	976,16%	540,60%	663,89%	661,63%	564,33%	496,65%	1133,36%	1999,95%	1287,55%	2134,70%	1972,09%	1873,40%	2869,62%	2088,66%	2610,63%	2028,95%	6244,84%	
	Kenaikan Rata-rata Kenaikan Rata-rata kenaikan sebelum/sesudah BPJS		22,69%	37,25%	69,38%	43,10%	307,21%	-106,22%	427,08%	209,36%	123,29%	-2,26%	-97,27%	7,92%	636,71%	866,59%	-712,39%	263,63%	-162,60%	-98,70%	996,23%	244,97%	521,97%	-581,68%	4215,90%	
																									1385,39%	
2	Rasio Lancar (current ratio)	311,01%	323,27%	458,69%	573,96%	641,53%	916,67%	736,14%	1544,36%	760,73%	943,62%	948,95%	795,85%	749,02%	1592,62%	2401,23%	1886,21%	2974,30%	2700,74%	2403,26%	4053,67%	2581,52%	3209,75%	2488,75%	6827,84%	
	Kenaikan Rata-rata Kenaikan Rata-rata kenaikan sebelum/sesudah BPJS		12,26%	135,43%	115,27%	87,65%	275,14%	-180,54%	808,22%	300,94%	182,89%	5,33%	-153,10%	11,71%	843,60%	808,60%	-515,02%	379,06%	-273,56%	-297,48%	1650,41%	359,79%	628,23%	-721,00%	4339,09%	
																									1415,44%	
3	Periode Penagihan Piutang	80	19	43	35	149	38	24	26	95	34	35	14	103	48	14	34	142	80	41	35	97	40	26	2	
	Kenaikan Rata-rata Kenaikan Rata-rata kenaikan sebelum/sesudah BPJS		(61)	25	(8)	(110)	(15)	3	(41)	(62)	2	(21)	(27)	(28)	(55)	(35)	20	(28)	(61)	(39)	(7)	(57)	(14)	(24)	(32)	
																									(30)	
4	Perputaran Aset Tetap (fixed asset turn over)	53,69%	103,50%	164,64%	210,19%	50,27%	100,66%	144,29%	182,44%	50,10%	134,15%	135,64%	160,03%	41,53%	99,58%	161,99%	204,52%	60,30%	104,28%	129,72%	129,78%	27,09%	58,74%	86,32%	110,84%	
	Kenaikan Rata-rata Kenaikan Rata-rata kenaikan sebelum/sesudah BPJS		49,81%	61,14%	45,55%	52,17%	50,39%	43,63%	38,16%	44,06%	84,06%	1,48%	24,39%	36,64%	44,29%	58,05%	62,41%	42,53%	54,33%	43,97%	25,44%	0,06%	23,16%	31,64%	27,59%	24,52%
																										27,92%
5	Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset)	1,08%	5,07%	20,94%	19,32%	8,52%	15,41%	18,79%	25,02%	11,21%	-72,96%	-24,24%	18,93%	12,29%	28,64%	60,35%	66,98%	28,16%	40,08%	39,87%	39,53%	5,18%	12,56%	17,33%	13,19%	
	Kenaikan Rata-rata Kenaikan Rata-rata kenaikan sebelum/sesudah BPJS		3,99%	15,88%	-1,62%	6,08%	6,88%	3,30%	6,23%	5,50%	-84,17%	48,72%	43,17%	2,57%	16,35%	31,71%	6,62%	18,23%	11,91%	-0,21%	-0,34%	3,79%	7,38%	4,77%	-4,14%	
																										2,67%
6	Imbalan Ekuitas (Return on Equity)	0,8%	3,8%	13,9%	13,4%	5,6%	10,7%	13,2%	17,7%	7,4%	-140,5%	-23,8%	21,2%	12,1%	24,9%	42,9%	48,2%	16,9%	24,3%	26,0%	30,5%	3,9%	9,1%	12,6%	10,8%	
	Kenaikan Rata-rata Kenaikan Rata-rata kenaikan sebelum/sesudah BPJS		3,0%	10,1%	-0,5%	4,2%	5,0%	2,5%	4,5%	4,0%	-147,9%	116,6%	45,0%	4,6%	12,8%	18,0%	5,3%	12,0%	7,4%	1,7%	4,5%	4,6%	5,2%	3,5%	-1,8%	
																										2,3%
7	Rasio Pendapatan PNPB terhadap biaya operas	88%	103%	95%	92%	101%	97%	95%	96%	110%	59%	75%	96%	120%	121%	135%	128%	163%	142%	124%	123%	107%	107%	106%	99%	
	Kenaikan Rata-rata Kenaikan Rata-rata kenaikan sebelum/sesudah BPJS		15%	-8%	-3%	1%	-4%	-2%	1%	-51%	16%	21%	-5%	3%	1%	14%	-7%	3%	-21%	-18%	-1%	0%	-1%	-7%	-3%	
																										-4%

Interpretasi Data

1) . Rasio Kas (*Cash Ratio*)
 Analisa atas rasio kas yang terjadi sebelum dilaksanakan BPJS tahun 2011 s.d tahun 2013 mengalami peningkatan rata-rata 86,79%. Dengan dilaksanakannya BPJS per 1 Januari 2014, analisa atas rasio kas 2014 s.d 2016 peningkatan yang terjadi jauh melebihi keadaan semula yang mencapai 631,33%. Peningkatan yang sangat tinggi ini mengindikasikan pelaksanaan BPJS berpengaruh positif terhadap rasio kas dibandingkan sebelum era BPJS. Gambaran rasio kas per tahun dapat dilihat sebagai berikut :

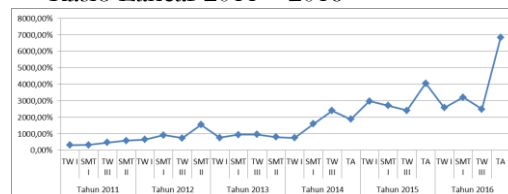
Grafik Rasio kas 2011 – 2016



Dari grafik di atas terlihat, per tahun rasio kas mengalami pertumbuhan. Namun pertumbuhan ini melaju lebih

tinggi pada era BPJS, yakni pada tahun 2014 – 2016.
 2) Rasio Lancar (*Current Ratio*)
 Analisa atas rasio lancar yang terjadi sebelum dilaksanakan BPJS tahun 2011 s.d tahun 2013 mengalami peningkatan rata-rata 133,43%. Dengan dilaksanakannya BPJS per 1 Januari 2014, analisa atas rasio lancar 2014 s.d 2016 peningkatan yang terjadi jauh melebihi keadaan semula yang mencapai 718,10%. Peningkatan yang sangat tinggi ini mengindikasikan pelaksanaan BPJS berpengaruh positif terhadap rasio lancar dibandingkan sebelum era BPJS. Gambaran rasio lancar per tahun dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik Rasio Lancar 2011 – 2016



Dari grafik di atas terlihat, per tahun Rasio Lancar mengalami

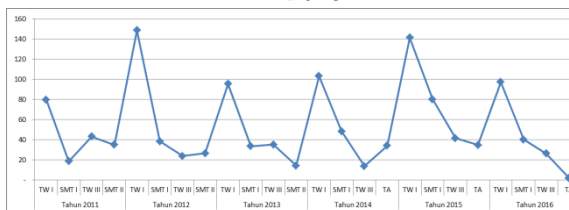
pertumbuhan. Namun pertumbuhan ini melaju lebih tinggi pada era BPJS, yakni pada tahun 2014 – 2016.

3) Periode Penagihan Piutang (*Collection Period*)

Analisa atas Periode Penagihan Piutang yang terjadi sebelum dilaksanakan BPJS tahun 2011 s.d tahun 2013 mengalami peningkatan rata-rata 28 hari. Dengan dilaksanakannya BPJS per 1 Januari 2014, analisa atas Periode Penagihan Piutang 2014 s.d 2016 mengalami peningkatan menjadi 30 hari. Hal ini mempunyai makna sebelum diberlakukan BPJS peningkatan kecepatan piutang menjadi kas tiap triwulan mengalami peningkatan rata-rata meningkat 28 hari, sedangkan setelah implementasi BPJS kemampuan untuk menjadikan kas ini meningkat lebih tinggi menjadi rata-rata 30 hari

Gambaran periode penagihan piutang per tahun dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik
Periode Penagihan Piutang 2011 – 2016



Dari grafik di atas terlihat, per tahun Periode Penagihan Piutang mengalami kenaikan, dan kenaikan ini lebih tinggi pada era BPJS, yakni pada tahun 2014 – 2016.

a.4. Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turnover*)

Analisa atas rasio Perputaran Aset Tetap tahun 2011 s.d tahun 2013 berkisar 44,29%. Analisa atas rasio Perputaran Aset Tetap, 2014 s.d 2016 mengalami penurunan dari keadaan semula yang menjadi 35,14%.

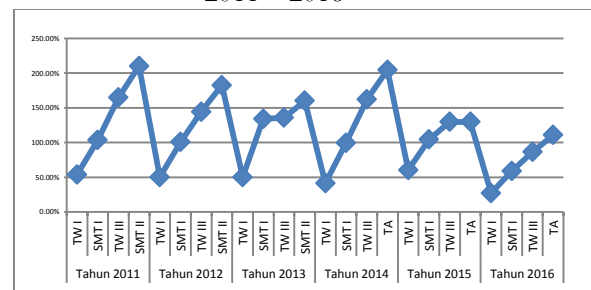
Penurunan ini menandakan adanya penurunan kinerja yang diperoleh RS. Bhayangkara Kediri atas sejumlah aset tetap yang dimiliki.

Besarnya aset tetap dalam kondisi rusak berat dan perlu dilakukan penghapusan akan membantu dalam efisiensi pemanfaatan aset tetap yang ada sehingga RS. Bhayangkara Kediri benar-benar mampu mendapatkan peningkatan kinerja yang tinggi dari aset yang dimilikinya.

Indicator rasio ini tidak mendukung dalam penelitian implementasi BPJS di RS. Bhayangkara Kediri

Gambaran rasio Perputaran Aset Tetap per tahun dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik
Rasio Perputaran Aset Tetap
2011 – 2016



Dari grafik di atas terlihat, per tahun Rasio perputaran aset tetap mengalami pertumbuhan. Namun rata-rata pertumbuhan mengalami penurunan. Meskipun demikian rasio ini tidak mendukung indicator atas implementasi BPJS di RS. Bhayangkara Kediri.

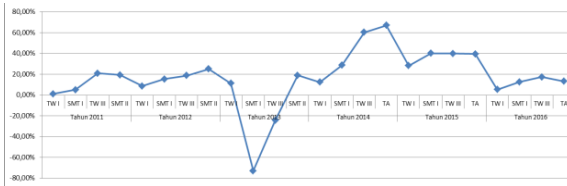
a.5. Imbalan Atas Aktiva Tetap (*Return on Asset*)

Analisa rasio Imbalan atas Aktiva Tetap yang terjadi sebelum dilaksanakan BPJS tahun 2011 s.d tahun 2013 berkisar 4,72%. Dengan dilaksanakannya BPJS per 1 Januari 2014, analisa atas rasio Imbalan atas Aktiva Tetap tahun 2014 s.d 2016 mengalami peningkatan dari keadaan semula yang mencapai 8,23%. Peningkatan ini mengindikasikan pelaksanaan BPJS berpengaruh positif terhadap Imbalan atas Aktiva Tetap dibandingkan sebelum era BPJS. Imbalan atas Aktiva Tetap yang bernilai positif menunjukkan total aktiva yang dimiliki oleh RS.

Bhayangkara Kediri mampu memberikan peningkatan kinerja. Dari total aktiva yang dimiliki RS. Bhayangkara Kediri, mampu meningkatkan kemampuan kerjanya dan lebih baik lagi ketika memasuki era BPJS.

Gambaran rasio Imbalan atas Aktiva Tetap per tahun dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik
Rasio Imbalan atas Aktiva Tetap
2011 – 2016



Dari grafik di atas terlihat, per tahun Rasio Imbalan atas Aktiva Tetap mengalami pertumbuhan. Dan pertumbuhan ini mengalami peningkatan lebih tinggi pada era BPJS, yakni pada tahun 2014 – 2016.

a.6. Imbalan Ekuitas (*Return on Equity*)

Analisa atas rasio Imbalan Ekuitas yang terjadi sebelum dilaksanakan BPJS tahun 2011 s.d tahun 2013 berkisar 4,3%. Dengan dilaksanakannya BPJS per 1 Januari 2014, analisa atas rasio Imbalan Ekuitas 2014 s.d 2016 mengalami peningkatan dari keadaan semula yang mencapai 6,3%. Peningkatan yang sangat tinggi ini mengindikasikan pelaksanaan BPJS berpengaruh positif terhadap Imbalan Ekuitas dibandingkan sebelum era BPJS. Hal ini menandakan semakin baik kinerja RS. Bhayangkara Kediri dari sisi pengelolaan ekuitasnya. Dari rasio ini dapat juga berarti semakin baik efisiensi yang dilakukan oleh RS. Bhayangkara Kediri dalam mengelola ekuitasnya untuk peningkatan kerjanya.

Gambaran rasio Imbalan Ekuitas per tahun dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik
Rasio Imbalan Ekuitas
2011 – 2016



Dari grafik di atas terlihat, per tahun Rasio Imbalan Ekuitas mengalami pertumbuhan. Namun pertumbuhan ini melaju lebih tinggi pada era BPJS, yakni pada tahun 2014 – 2016.

a.7. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional

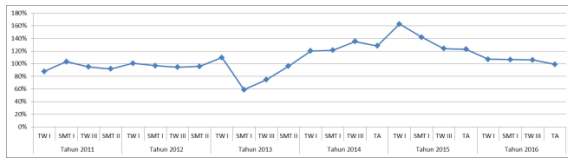
Analisa atas pendapatan PNBPN dengan biaya operasional yang terjadi tahun 2011 s.d tahun 2013 berkisar -2%. Artinya hasil perbandingan antara pendapatan khusus PNBPN yakni tanpa pendapatan sumber Apbn jika digunakan untuk juga menutup kemampuan dalam menutup seluruh biaya operasional termasuk biaya dari sumber Apbn belum dapat mencukupi, sehingga RS. Bhayangkara Kediri belum mampu tanpa tambahan dukungan dana dari sumber Apbn.

Analisa atas pendapatan PNBPN dengan biaya operasional tahun 2014 s.d 2016 semakin menurun hanya berkisar -4%. Penurunan ini mengindikasikan semakin berat kemampuan pembiayaan seluruh operasional tanpa dukungan sumber Apbn. Rasio ini tidak mendukung indikator implementasi BPJS bagi RS. Bhayangkara Kediri.

Gambaran Pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional per tahun dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik

Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional 2011 – 2016



Dari grafik di atas terlihat, per tahun pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional belum mengalami pertumbuhan, yang mengindikasikan belum mampu mencukupi biaya operasional tanpa dukungan APBN.

b. Implikasi Hasil Penelitian

Terdapat 5 (lima) indikator atas implementasi BPJS yang menunjukkan peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa :

- a. Perkembangan kinerja keuangan RS. Bhayangkara Kediri mengalami peningkatan lebih tinggi setelah penerapan BPJS dibandingkan sebelumnya.
- b. Penerapan BPJS di awal tahun 2014 terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan satker BLU RS. Bhayangkara Kediri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan alat penilaian kinerja keuangan, dari 7 alat rasio keuangan yang digunakan bagi satker BLU (Per-DJPB nomor Per-36/PB/2012), terdapat 5 (lima) indikator atas implementasi BPJS yang menunjukkan peningkatan.

Rasio ini meliputi Rasio Kas, Rasio Lancar, Periode Penagihan Piutang, Imbalan atas Aktiva Tetap dan Imbalan Ekuitas. Hal ini menunjukkan bahwa :

- a. Perkembangan kinerja keuangan RS. Bhayangkara Kediri mengalami peningkatan lebih tinggi setelah penerapan BPJS dibandingkan sebelumnya.
- b. Penerapan BPJS di awal tahun 2014 terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan satker BLU RS. Bhayangkara Kediri

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP nomor 23 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*

Peraturan Menteri Keuangan nomor 76/PMK.05/2008 tentang *Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum*

Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2013 tentang *Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akuntansi Rumah Sakit pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2012. *Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum*.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-54/PB/2013. *Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan*.

Wijyaningrum, Etika. 2012. *Analisis Pengaruh Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Sebelum Dan Sesudah Penerapan PPK-BLU (Kasus pada RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta)*

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Manual Pengelolaan Satker BLU Bidang Layanan Kesehatan*.

Nakke, Fadly. 2012. *Interpretasi Rasio Manajemen Keuangan*. Dzulfadhly.blogspot.com

Dunia Ekonomi. 2011. *Teori Manajemen Keuangan, Pemasaran, Perbankan dan SDM : Return on Asset (ROA)*. Ekonomi.kabo.biz

- Workshop. 2015. *Implikasi Revisi UU PNPB Terhadap Revisi PP 23/2005*. Kemenkeu RI.
- D. Malonda.Taliana., Rattu,A.J., Soleman. T., 2015. *Artikel Penelitian : Analisis Pengajuan Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan di RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano*.
- Wildana., M. Maidin, Alimin., Prof.Dr.dr.H.MPH., A.Pasinringi., Syahrir,Dr,MS. 2012. *Artikel Penelitian : Kajian Implementasi Penerapan Badan Layanan Umum di RS.Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2012*.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Perpres 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional
- PP nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
- Direktorat PPK-BLU, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, BLU Integrated Online System, 2015
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan PK BLU nomor Kep/273/PB.5/2015 tentang Penetapan hasil penilaian kinerja Badan Layanan Umum bidang layanan kesehatan Tahun Anggaran 2014
- Laporan Keuangan RS. Bhayangkara Kediri Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40, 2004, *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24, 2011, *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Republik Indonesia